



**REN\$TRA
2016-2021**

PERUBAHAN REN\$TRA (2016-2021)

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : Tahun 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan Tahun 2016 – 2021 dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, penatarap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 100);

12. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 04).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Luwu Timur sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Malili,

KABALA DINAS



MASDIN, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I/IV-b

NIP 19730315 199311 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di *Malili*;
3. *Arsip*

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2016 – 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR 2016 – 2021**

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- III. Kelompok Kerja :
1. Kabid Aplikasi Informatika
 2. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
 3. Kabid Telematika
 4. Kasie E-Government
 5. Kasie Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 6. Kasie Telekomunikasi
 7. Kasie Infrastruktur dan Teknologi
 8. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 9. Kasubag Umum dan Keuangan

Malili,
KEPALA DINAS

MASDIN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV-b
NIP. 19730315 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.

Kami berharap bahwa dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan perkembangan Kabupaten Luwu Timur.

Untuk itu kepada seluruh pihak yang terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dan kebersamaannya mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

Malili, 2019
KEPALA DINAS,

MASDIN, AP., M.Si
NIP. 19730315 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
AB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1.1 Tugas Poko.....	7
2.1.2 Fungsi.....	7
2.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi.....	17
2.1.4 Sumber Daya.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRA EGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.....	27
3.3 Telaah Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Selatan.....	64
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1 Tujuan	40
4.2 Sasaran.....	41
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIKAN.....	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	46
6.2 Kelompok Sasaran.....	50

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
BAB VIII PENUTUP.....	66
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dibidang komunikasi dan informasi kedepannya.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya. Bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan target.

Secara keseluruhan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005

- 2025 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 100);
- 13. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 38);
- 14. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
- 15. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 04).
- 16. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral.
- 17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur adalah terwujudnya komitmen dan

konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioprasionalkan secara konsisten berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif. Tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis OPD dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA OPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang telematika;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di aplikasi informatika;
 - d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja pengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, pengoordinasikan informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, pengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi kemitraan Informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika

Tugas Pokok Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Telematika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang telekomunikasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Tugas Pokok Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Telekomunikasi

Tugas Pokok Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi telekomunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang telekomunikasi;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang telekomunikasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang telekomunikasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Tugas Pokok Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi keamanan informasi dan persandian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan informasi dan persandian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keamanan Informasi dan Persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database

Tugas Pokok Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan database berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan database Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E-Government

Tugas Pokok Seksi E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di Seksi E-Government berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang E-Government;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang E-Government;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang E-Government; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Statistik

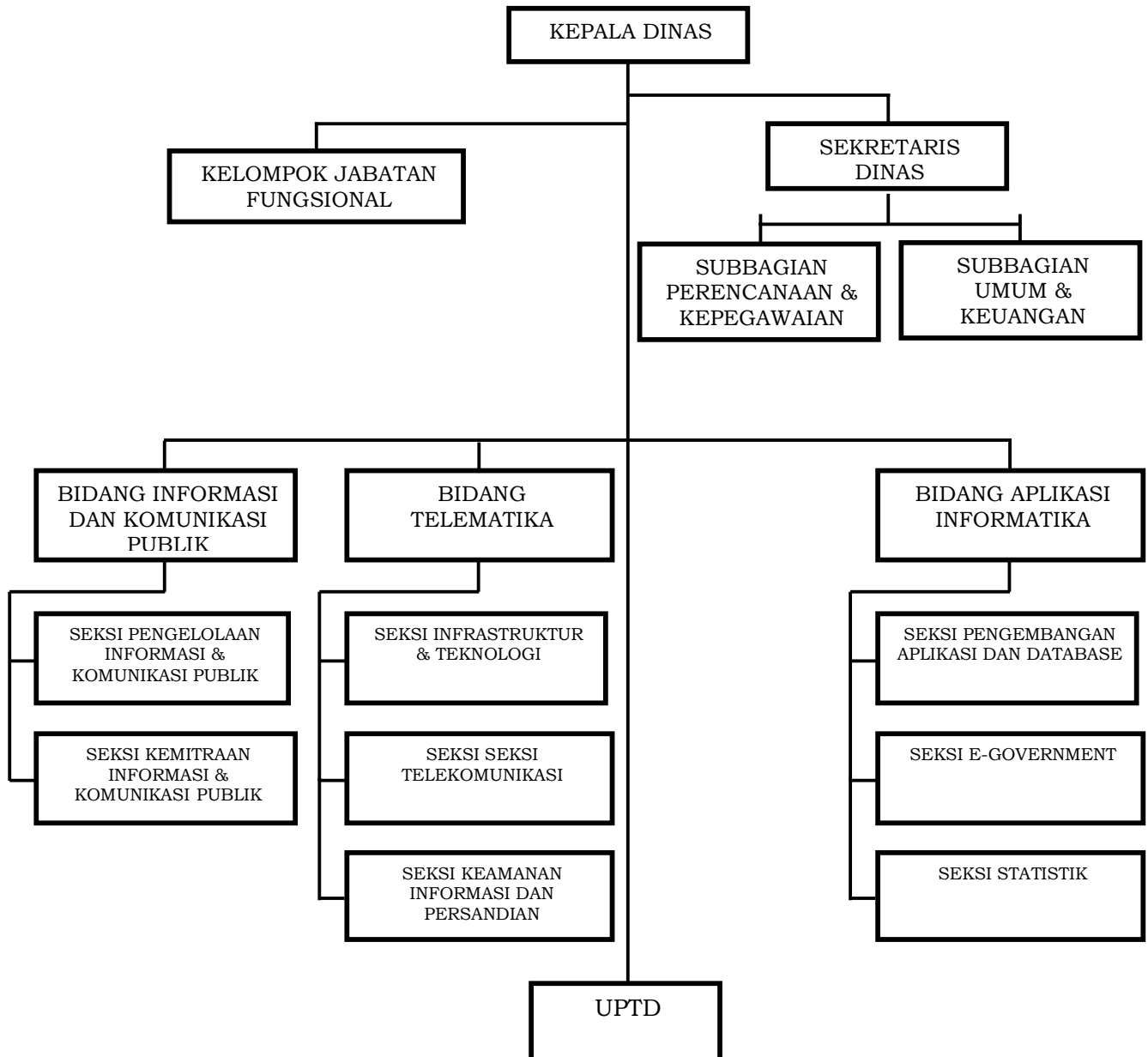
Tugas Pokok Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Statistik; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, yang terdiri dari :

-  Pegawai Negeri Sipil (ASN) : 21 Orang
-  Tenaga Upah Jasa : 16 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa Dinas Komunikasi dan Informatika menurut data terakhir pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Tabel 1
Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	IV-c						1
2	IV-a						1
3	III-d					6	
4	III-c					4	1
5	III-b					1	
6	III-a				2	1	
7	II-c			2			
8	II-b			1			
9	II-a						
10	Upah Jasa operator					6	
11	Upah Jasa Administrasi Kehumasan					6	
12	Sopir			1			
13	Security	1		1			
14	Cleaning Service			2			
Jumlah		1	-	7	2	24	3

b. Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Tabel 2
Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	24
2	Perempuan	13
Jumlah		37

c. Berdasarkan Golongan/Ruang (Orang)

Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV-e	-
2.	IV-d	-
3.	IV-c	1
4.	IV-b	1
5.	IV-a	-
Jumlah Golongan IV		2
1.	III-d	6
2.	III-c	5
3.	III-b	1
4.	III-a	3
Jumlah Golongan III		15
1.	II-d	-
2.	II-c	2
3.	II-b	1
4.	II-a	-
Jumlah Golongan II		3

d. Berdasarkan Masa Kerja (Orang)

Tabel 4
Komposisi PNS Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah
1.	0 – 5 Tahun	5
2.	6 – 10 Tahun	7
3.	11 – 15 Tahun	5
4.	16 – 20 Tahun	2
5.	21 – 25 Tahun	1
6.	26 – 30 Tahun	1

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur selama periode Tahun 2010 – 2015 ditunjukkan pada Tabel 5 tentang review pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan Tabel 6 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD.

Pada Tabel 5 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada lampiran 01

Pada Tabel 6 tentang anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum realisasi belanja hampir mencapai 100%. Sedangkan disektor pendapatan terdapat peningkatan signifikan di tahun pertama sampai tahun ke tiga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seperti kata pepatah *"Siapa menguasai Informasi maka dia akan menguasai dunia"* (*He Who Rules Information Rules The World*). Pepatah tersebut bukanlah isapan jempol belaka, dunia informasi dan kebutuhan akan berita merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Siapapun yang memperoleh informasi lebih dahulu akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Era globalisasi (era digital) menjadikan dunia seperti tidak mempunyai batas yang nyata, arus informasi dapat datang dan pergi tanpa bisa dicegah, sehingga menjadikan batas wilayah suatu Negara seperti maya adanya. Manusia modern sangat tergantung akan media elektronik, khususnya kebutuhan akan berita, dan akan merasakan hidupnya hampa tanpa mengetahui informasi yang sedang berkembang.

Belajar pada kejadian Tahun 2008, pada masa kampanye Presiden Amerika Serikat, Barack Obama sukses meraup suara terbanyak yang mengantarkannya ke gedung putih sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 dan berhasil menyingkirkan Hillary Clinton, Rudy Giuliani dan John McCain yang merupakan calon kuat. Obama memiliki 100 orang yang bekerja pada tim digitalnya di markas mereka di Chicago dan 40 orang lagi tersebar di Negara-negara bagian lainnya. Strategi ini kemudian banyak ditiru oleh calon pemimpin dunia termasuk Indonesia sehingga kebenaran dari doktrin bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia benar adanya. Teknologi informasi (IT) merupakan produk jaman modern yang selalu di *upgrade* kemampuannya dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan kemajuan teknologi informasi tidak berbanding lurus dengan kemajuan bidang lainnya. Suatu berita yang menyebar dapat dengan mudah menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra, bahkan dapat menimbulkan aksi anarkhis.

Kondisi ini sangat dipahami oleh Kabupaten Luwu Timur, sehingga arah kebijakan Kabupaten Luwu Timur memberikan angin segar bagi perkembangan teknologi informasi, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan semakin meningkatkan pemanfaatan IT dalam kegiatan pemerintahan baik dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk dapat mengakses dan terlibat dalam tahapan pemerintahan khususnya pengawasan sehingga akuntabilitas kinerja publik dapat terwujud.

Beberapa hal yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung E-Government di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang IT serta peningkatan kompetensi SDM yang tentu saja harus

didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai serta memperhatikan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan sehingga arah pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan

a. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Sumber RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 - 2019*)

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

b. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan (*Sumber RENSTRA Diskominfo 2013 - 2018*)

1. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
2. Manajemen perkantoran yang lebih efisien melalui E-office.
3. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan pemerintah dan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat.

4. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis eletronis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public yang efektif , efisien dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi E-Government.
5. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
6. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan E-Government dan penyelenggaraan pemerintahan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sampai evaluasi.

Adapun telaah yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Harus dilakukan peningkatan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi;
- b. Meningkatkan penggunaan aplikasi dalam rangka pelayanan masyarakat menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government);
- c. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) agar mampu melaksanakan tugas dengan akuntabel dan reponsif serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan demikian kebijakan nasional Kementerian Komunikasi dan informatika serta Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Selatan sangat mendukung dan sejalan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.

2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikatkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

Tabel 7
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Internet masuk desa	Warnet	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur	- Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di desa - Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan)	Seluruh Desa

Tabel 8
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola ruang Saat Ini	Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Pemerintahan dan kawasan pemukiman	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur	- Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di desa - Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan)	Seluruh Desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur adalah Pelayanan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Selama periode berdirinya Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diatasi antara lain pelayanan telekomunikasi yang masih belum maksimal antara lain :

- a. Pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan, dimana sampai saat ini masih terdapat 10 (sepuluh) desa yang masuk dalam kategori belum terjangkau signal telpon (*blank spot*). Layanan internet masih mahal dan hanya dapat diakses di wilayah kota (kota kabupaten dan kota kecamatan). Hal ini disebabkan karena pihak operator telpon seluler masih enggan membangun BTS di wilayah pedesaan yang jauh dari kota dengan alasan ketersediaan listrik dan calon pengguna jasa layanan yang masih sedikit sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan
- b. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat, sehingga masyarakat masih sulit berpartisipasi dan ikut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik.
- c. Kualitas SDM masih sangat kurang khususnya di bidang Informasi dan teknologi (IT)

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Bapak H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bapak Irwan Bachri Syam, ST periode 2016 – 2021 adalah “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Visi ini bermakna bahwa pada Tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang jadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa ***“Wanua Mappatuo Naewai Alena”***, artinya ***negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya***. Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumber daya yang dimiliki daerah ini. Visi tersebut kemudian dirumuskan kedalam 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Jika menilik misi dan penjelasan pada 118 (seratus delapan belas) program prioritas yang ada, maka pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterkaitan pada :

Misi 5

“ Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Serta Sarana Prasarana Wilayah Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Daerah ”

Misi ini mencakup upaya mendukung peningkatan kapasitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika selaku menanggungjawab fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan OPD yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 9
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komuniiasi dan Informatika
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah			
a.	Internet Masuk Desa	- Penyediaan layanan internet belum tersedia di seluruh desa dan belum termanfaatkan secara baik oleh masyarakat	- Tidak semua desa sudah terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi	- Penggunaan internet oleh masyarakat cukup tinggi menggunakan telephone seluler
			- Penyedia tower telekomunikasi hanya membangun di wilayah yang menguntungkan secara ekonomis	- Beberapa operator telekomunikasi telah menyediakan infrastruktur layanan intenet berupa BTS dan FO yang dapat mendukung penggunaan internet disertai dengan layanan internet yang bisa diakses menggunakan smartphone dan modem
			- Mahalnya infrastruktur jaringan internet dan sewa bandwidth	- Telah ada beberapa usaha masyarakat di luwu timur sejenis RTRWnet (Maltek, Climax dll) yang bergerak disektor penyedia bandwidth yang dapat dikerjasamakan dengan desa untuk

				menyediakan layanan internet
			- Kontur wilayah Kab. Luwu Timur yang berupa pegunungan sehingga membatasi penggunaan wifi	- Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi masterplan penyusunan menara telekomunikasi
			- Alih fungsi warnet ke bisnis warkop yang dilengkapi fasilitas wifi	- Adanya upaya untuk mendorong pengelola RTRWnet untuk membentuk ISP
			- Adanya 10 desa yang masuk dalam katagori bank spot area	
			- Pengelola RTRWnet belum mengantongi izin ISP	

3.3. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Selatan.

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 -2019

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 – 2019 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten dengan Renstra kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel 10
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan sehingga masih terdapat 10 desa yang masuk dalam kategori daerah belum terjangkau sinyal telepon (blank spot). Layanan yang berbasis internet masih mahal dan hanya dapat diakses di wilayah kota	- Kebijakan operator telekomunikasi yang hanya membangun tower di wilayah perkotaan saja, dengan alasan keuntungan perusahaan. - Layanan internet yang ditawarkan operator tidak merata 4G dan 3G, di beberapa daerah hanya GPRS dan EDGE	- Tingginya animo masyarakat menggunakan internet meskipun masih terbatas penggunaannya untuk aktifitas media sosial - Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT - Diharapkan muncul media alternative milik pemerintah seperti radio, Koran dll
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan			
3	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman	Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat.	- Masih kurangnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat - Sarana internet gratis belum	- Tingginya animo masyarakat mengakses informasi menggunakan internet

		Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang public	tersedia di desa-desa	Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, revolusi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien			

3.3.2. Telaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi selatan sebagai symbol komunikasi dan informasi luar jawa	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan sehingga masih terdapat 10 desa masuk dalam kategori daerah belum terjangkau sinyal telepon (blank spot). Layanan yang berbasis internet masih mahal dan hanya dapat diakses di wilayah kota	- Kebijakan operator telekomunikasi yang hanya membangun tower di perkotaan saja, dengan alasan keuntungan perusahaan. - Layanan internet yang ditawarkan operator tidak merata 4G dan 3G, di beberapa daerah hanya GPRS dan EDGE	- Tingginya animo masyarakat menggunakan internet meskipun masih terbatas penggunaannya untuk aktifitas media sosial - Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT - Diharapkan muncul media alternative milik pemerintah seperti radio, Koran dll

2	Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Selatan			
3	Terwujudnya pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas di Sulawesi Selatan			
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan pelayanan komunikasi dan informatika			
5.	Terwujudnya pelayanan telematika yang efisien, mampu mendorong produktifitas dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi selatan dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan sehingga masih terdapat 10 desa masuk dalam kategori daerah belum terjangkau sinyal telepon (blank spot). Layanan yang berbasis internet masih mahal dan hanya dapat diakses di wilayah kota	- Kebijakan operator telekomunikasi yang hanya membangun tower di perkotaan saja, dengan alasan keuntungan perusahaan. - Layanan internet yang ditawarkan operator tidak merata 4G dan 3G, di beberapa daerah hanya GPRS dan EDGE	- Tingginya animo masyarakat menggunakan internet meskipun masih terbatas penggunaannya untuk aktifitas media sosial - Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT - Diharapkan muncul media alternative milik pemerintah seperti radio, Koran dll
6.	Terwujudnya jaringan intranet dan internet dilingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan			

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 (tiga) stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/kabupaten.

Berdasarkan RTRW, terdapat 2 (dua) kawasan penggunaan lahan terhadap potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk :

- a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan;
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi :

-  Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang beserta sumber daya yang ada didalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya;

-  Dorong terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya
- 2. Kelestarian Lingkungan, meliputi :
 -  Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam kurun waktu panjang;
 -  Jaminan terhadap kualitas lingkungan
- 3. Tanggapan terhadap dinamika perkembangan, meliputi :
 -  Peningkatan pendapatan masyarakat
 -  Peningkatan pendapatan daerah
 -  Peningkatan kesempatan kerja
 -  Peningkatan ekspor
 -  Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

2. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Selain potensi pengembangan kawasan diatas jika dikaitkan dengan fungsi strategis wilayah berdasarkan struktur dan pola ruang kawasan prioritas yang akan dikembangkan :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan strategis nasional dimaksudkan adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW, KSN Sorowako lingkup kegiatan KSN Sorowako adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan strategis provinsi dimaksud adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur adalah :

-  Kawasan lumbung beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena;

- ✚ Kawasan pengembangan jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau;
- ✚ Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan;
- ✚ Kawasan Tambang nikel di Sorowako
- ✚ Kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona
- ✚ Kawasan cagar alam Parumpanai, Cagar alam Kalaena, Taman Wisata alam danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Pengembangan kawasan strategis kabupaten ditinjau dari sudut pengembangan perekonomian terdiri atas :

1. Kawasan pemerintahan, diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada Kecamatan Malili;
2. Kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan;
3. Kawasan agropolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan tanaman hutan rakyat.
4. Kawasan minapolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi sektor perikanan dan kelautan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi komunikasi dan informatika, dimana dengan penyebarluasan informasi rencana Kawasan Strategis dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan kawasan strategis.

3.5. Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan OPD

Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur belum mengacu pada KLHS, tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah direvisi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 telah memasukkan unsure kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. Seluruh pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsure wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Milenium Development Goal, sesuai diamanatkan impress Nomor 03 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu

strategis, dimana fakta dan factor kunci tersebut mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan OPD
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 dilakukan dengan metode pembobotan :

Tabel 11
Nilai Skor Kreteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Berdasarkan hasil review factor – factor dari pelayanan OPD yang memenuhi permasalahan pelayanan OPD maka didapatkan 2 isu yang akan dijadikan isu strategis. Oleh karena itu untuk menguji apakah ke 2 isu tersebut dapat dijadikan isu strategis maka dilakukan pembobotan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 12
Nilai Skala Kreteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kreteria Ke-						Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan sehingga masih terdapat 10 desa yang masuk dalam kategori daerah belum terjangkau sinyal telepon	10	10	20	5	5	15	65	10,83
2	Tersedianya akses dan layanan internet di pedesaan (internet masuk desa)	10	10	10	5	5	25	65	10,83

Berdasarkan hasil pembobotan maka isu dengan bobot diatas 50 yang akan dimasukkan sebagai isu strategis dan pada Tabel 12 menunjukkan kedua isu tersebut layak dijadikan isu strategis pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2016-2021 yaitu “ **Luwu Timur Terkemuka 2021** “, sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur adalah :

Misi Ke-5 RPJMD yaitu “**Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah**”. Selanjutnya sesuai Tujuan ke-6 RPJMD yaitu : “**Menguatkan dukungan infrastruktur wilayah bagi interkoneksi dan pergerakan antar wilayah**”. Dengan sasarannya adalah : “**Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur**”

Berdasarkan Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, maka rumusan tujuan renstra adalah : “**Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika**”. Dengan mengacu pada beberapa indikator antara lain :

- a) Cakupan layanan internet;
- b) Cakupan kinerja sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah;
- c) Nilai LAKIP.

4.2. Sasaran

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan renstra, maka di rumuskan beberapa sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas layanan internet;
- 2) Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah.

Penjabaran sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2021
						2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika (T1)	Cakupan layanan komunikasi dan informatika	74%			0%	37,00%	49,00%	60,00%	74,00%	74,00%
				Meningkatnya aksesibilitas layanan internet (S1)	Cakupan layanan internet	0%	47,92%	60,82%	72,44%	100%	100%
				Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintahan daerah (S2)	Cakupan kinerja sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintahan daerah	0%	25,64%	37,99%	48,34%	48,34%	48,78%
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah (S3)	Nilai LAKIP	0	B	B	BB	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Tujuan ,Sasaran , Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika (T1)	Meningkatnya aksesibilitas layanan internet (S1)	Mengoptimalkan kualitas infrastruktur jaringan	Memberikan jaminan terhadap kualitas infrastruktur jaringan
		Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintahan daerah (S2)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis E-Government	Menciptakan system informasi komunikasi yang terintegrasi, terpadu, dinamis dan terkoordinasi
			Meningkatkan keamanan sistem informasi	Menciptakan keamanan sistem informasi
			Memaksimalkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik	Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah (S3)	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

			Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga	1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah, Dan Kinerja Secara Transparan. 5. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Dan Monev Terhadap Kinerja
--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa administrasi keuangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan alat tulis kantor
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan bahan logistik kantor
			Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
			Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD
			Monitoring dan Evaluasi
			Kunjungan kerja dalam daerah
			Penyediaan makan dan minum
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase rata-rata peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor
			Pengadaan Peralatan & Perlengkapan dinas/operasional
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase rata-rata peningkatan kapasitas aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase dokumen yang dibuat tepat waktu	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
			Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
6	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun tepat waktu	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
7	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Presentase dokumen Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Penyusunan Profil Kabupaten dan Profil Kecamatan
			Penyusunan Perkembangan Perekonomian
			Penyusunan dan pengolahan data pembangunan daerah
8	Program pengembangan dan pemanfaatan telematika	Jumlah titik akses internet yang dikembangkan	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
			Pemeliharaan peralatan pengembangan jaringan
			Pengembangan jaringan internet desa

			Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika
9	Program pengembangan implementasi E-Government	Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi E-Government yang terintegrasi	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi
			Pengelolaan domain, portal dan website
			Pengelolaan layanan sistem LPSE
10	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	Jumlah informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terpublikasi	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
			Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID)
11	Program Pengembangan komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang dikembangkan	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi
			Pengakajian dan Pengembangan Sistem Informasi
			Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

			Pengamanan Berita Sandi dan Telekomunikasi
			Pembinaan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
			Rencana Induk Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi
			Pemanfaatan aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik (E-Office)
			Pengelolaan konten website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
			Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah
			Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi
12	Program pengembangan sistem keamanan telekomunikasi, informasi dan komunikasi	Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan	Pengembangan perangkat dan sistem data center

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD Seperti yang kita lihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan alat tulis kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan bahan logistik kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Monitoring dan Evaluasi	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kunjungan kerja dalam daerah	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyediaan makan minum	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika

		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program peningkatan kapasitas aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Program pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Penyusunan profil kabupaten dan profil kecamatan	Stakeholders dan masyarakat
		Penyusunan Perkembangan	Stakeholders dan masyarakat

		perekonomian	
		Penyusunan dan pengolahan data pembangunan daerah	Stakeholders dan masyarakat
8	Program pengembangan dan pemanfaatan telematika	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pemeliharaan peralatan pengembangan jaringan	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengembangan jaringan internet desa	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika	ASN Pemkab Luwu Timur
9	Program pengembangan implementasi E-Government	Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengelolaan domain, portal, dan website	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengelolaan layanan sistem LPSE	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
10	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Stakeholders dan masyarakat
		Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Stakeholders dan masyarakat
		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Stakeholders dan masyarakat
		Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID)	Stakeholders dan masyarakat

11	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengamanan Berita Sandi dan Telekomunikasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pembinaan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Rencana Induk Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pemanfaatan aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik (E-Office)	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengelolaan konten website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
		Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi	OPD lingkup Pemkab Luwu Timur
12	Program pengembangan sistem keamanan telekomunikasi, informasi dan komunikasi	Pengembangan perangkat dan sistem data center	Stakeholders dan masyarakat

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Besaran Kinerja Per Tahun												Lokasi
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah	Nilai AKIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi rata-rata Pencapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	0	0	90 %	880,693,000	90 %	912.667.000	90 %	933.842.850	90 %	1.045.522.554	90 %	3.772.725.404	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai perangko dan benda pos yang tersedia	450 Lbr	0	0	0	0	0	450	4.000.000	450	4.050.000	900	8.050.000	Diskominfo	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening bulanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayarkan	12 Rek	0	0	12 Rek	55,000,000	36 Rek	68.400.000	36 Rek	71.820.000	36 Rek	73.615.500	156 Rek	369,398,342	Diskominfo
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan yang terbayarkan	12 Bln	0	0	12 bln	44.390.000	12 bln	60.320.000	6 Org	60.320.000	6 org	63.336.000	12 Org	228,366,000	Diskominfo
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang Terbayarkan	60 Buah	0	0	60 Buah	18.500.000	69 Buah	26.000.000	2 Org	38.000.000	2 org	39.000.000	4 org	121,500,000	Diskominfo
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	41 unit	0	0	41 Unit	85,000,000	41 Unit	117.250.000	45 Unit	123.112.500	45 Unit	123.112.500	172 unit	448,475,000	Diskominfo

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10000 Lembar	0	0	0	0	0	10.000	15.000.000	10.000	25.000.000	20.000	40.000,000	Diskominfo	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	15 Jenis	0	0	0	0	0	15	30.000.000	20	30.000.000	35	60.000,000	Diskominfo	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan yang Tersedia	20 Buah	0	0	0 Buah	1.000,000	0 Buah	1.000.000	30 Buah	1.500.000	30 buah	1.500.000	60 Buah	5.500,000	Diskominfo
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	0	0	60 eksamplar	6.180,000	60 eksamplar	6.240.000	60 eksamplar	6.240.000	60 eksamplar	6.552.000	240 eksamplar	25.524,000	Diskominfo
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bakar genset dan mesin pemotong rumput yang tersedia	0 liter	0	0	0	0	0	780 liter	6.000.000	780 liter	6.000.000	1560 liter	12.000,000	Diskominfo	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	64 kali	0	0	64 kali	369.670,000	50 kali	276.190.000	65 kali	303.809.000	70 Kali	334.189.900	249 Kali	1.283.858,000	Diskominfo
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis yang Terbayarkan	14 orang	0	0	14 org	148.000.000	16 orang	204.000.000	16 org	198.000.000	16 org	204.000.000	62 org	754.000,000	Diskominfo
			Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan OPD	Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan OPD yang terpenuhi	95 %	0	0	95 %	76.095,000	95 %	67.385.000	0	0	0	0	95%	143.480,000	Diskominfo
			Monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan yang disusun	0 dok	0	0	4 Dok	18.500,000	4 Dok	14.134.000	4 Dok	14.487.350	4 dok	14.849.534	16 dok.	61.970,884	Diskominfo
			Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam	290 Kali	0	0	232 kali	58.358,000	289 kali	71.748.000	320 kali	46.242.000	358 kali	103.317.120	1199 kali	279.665,120	Diskominfo

					Daerah yang dilaksanakan													
			Penyediaan makan dan minum	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Kotak	0	0	0	0	0	0	800	15.000.000	880	17.000.000	1680	32.000.000	Diskominfo
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase rata-rata capaian kinerja sarana prasarana aparatur	95 %	0	0	95%	985,095,977	95 %	1.388.308.000	95 %	163.000.000	95 %	798,000,000	95 %	3.334.403.977	
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 Unit	0	0	0	0	1 unit	966.008.000	0	0	1 Unit	500.000.000	2 Unit	1,466,008,000	Diskominfo
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50,000,000	Diskominfo
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	0	0	2 unit	581,000,000	1 unit	5.000.000	0	0	0	0	3 Unit	586,000,000	Diskominfo
			Pengadaan Peralatan & perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	114 Unit	0	0	50 Unit	369,095,977	15 Unit	178.300.000	14 Unit	120.000.000	16 Unit	190.000.000	95 unit	857,395,977	Diskominfo
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 unit	0	0	1 unit	20.000.000	1 unit	216.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	6 unit	276,000,000	Diskominfo
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	0	0	1 unit	15,000,000	6 unit	23.000.000	6 unit	23.000.000	7 unit	38.000.000	19 unit	84,000,000	Diskominfo
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase rata-rata peningkatan disiplin aparatur	100 %	0	0	0	0	100 %	8,250,000	100%	0	100 %	16.000.000	300 %	24.250.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diadakan	0 psg	0	0	0	0	0	0	0 psg	0	0	0	0 psg	0	Diskominfo

				Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Orang	0	0		0	23	8,250,000	0	0	38	16.000.000	61 psg	24,250,000	Diskominfo
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis dan pelatihan	62,22 %	0	0	62,22 %	99,000,000	43,48 %	100.000.000	65,22 %	130.000.000	65,22 %	150.000.000	59,035 %	479.000,000	
				Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop,seminar perundang-undangan	37 org	0	0	15 org	99,000,000	10 org	100.000.000	15 org	130.000.000	15 org	150.000.000	55 org	479,000,000	Dalam dan Luar Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian dan keuangan yang tersusun tepat waktu	6 Dok	0	0	0	0	6 dok	9.000.000	6 dok	12.000.000	6 dok	8.000.000	18 dok	29,000,000	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen ikhtisar perencanaan yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	4 dok	5.000.000	4 dok	4.000.000	0	0	8 dok	9,000,000	Diskominfo
				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	7 dok	12,000,000	Diskominfo
				Penyusunan laporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1 dok	4.000.000	1 dok	4.000.000	2 dok	8,000,000	Diskominfo
				Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	0 Dok	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo

			Program Perencanaan dan Penganggaran OPD	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen	0	0	6	10,000,000	7	10.000.000	4	35.020.000	4	35.020.000	25	90,040,000	
			Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat	0 dok	0	0	6 dok	10.000.000	7 dok	10.000.000	8 dok	35.020.000	8 dok	35.020.000	25 dok	90,040.000	Diskominfo
Meningkatnya aksesibilitas layanan internet	Persentase OPD yang terlayani jaringan backbone		Program pengembangan dan pemanfaatan telematika	Jumlah titik akses internet dikembangkan	0 Titik	0	0	0	0	0	0	128 titik(38 + 90)	2,279,460,000	156 titik(39 + 114 + 3)	3,720,000,000	142 titik	5,999,460,000	
	Persentase desa yang terlayani internet		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses internet OPD yang dikembangkan	0 Titik	0	0	0	0	0	0	39 titik (28 OPD + 6 server + 5 IP)	1.500.000.000	40 titik (28 OPD + 7 server + 7 internet publik)	3.000.000.000	79 titik	4,500,000,000	Kabupaten Luwu Timur
			Pemeliharaan peralatan pengembangan jaringan	Persentase titik akses internet yang terpelihara dengan baik	0 %	0	0	0	0	0	0	100 %	265.000.000	100 %	270.000.000	100 %	535,000,000	Kabupaten Luwu Timur
			Pengembangan jaringan internet desa	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	0 Desa/ Kel	0	0	0	0	0	0	67 desa/ kel	364.460.000	127 desa/ kel	250.000.000	194 desa/ kel	614,460,000	Kabupaten Luwu Timur
			Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih	0 Orang	0	0	0	0	0	0	124 orang	150.000.000	124 org	200.000.000	248 org	350,000,000	Kabupaten Luwu Timur
			Program Pengembangan Sistem Keamanan telekomunikasi, informasi & komunikasi	Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	1 aplikasi	1.694.046.368	2 aplikasi	1.538.000.000	1,5 aplikasi	3,232,046,368	
			Pengembangan perangkat	Jumlah perangkat	0 Unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	1.694.046.368	2 unit	1.538.000.000	2 unit	3,232,046,368	SKPD

				dan sistem data center	system data center yang dikembangkan														
	Meningkatnya sistem keamanan & layanan informasi manajemen pemerintah daerah	Cakupan kinerja sistem keamanan & layanan informasi manajemen pemerintah daerah		Program Pengembangan Implementasi E-Government	Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi E-Government yang terintegrasi	39 OPD	0	0	0	0	0	0	39 OPD	882.000.000	39 OPD	1.761.775.000	39 OPD	2,643,775,000	
				Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi E-Government yang dikembangkan	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	4 Aplikasi	150.000.000	8 aplikasi	650.000.000	12 aplikasi	800,000,000	SKPD
				Pengelolaan domain, portal dan website	Jumlah portal dan website yang dikelola	0 OPD	0	0	0	0	0	0	39	80.000.000	39	109.775.000	78	189,775,000	SKPD
				Pengelolaan Layanan sistem LPSE	Jumlah paket yang dilelang secara elektronik dan E-purchasing	0 Paket	0	0	0	0	0	0	316 Paket	652.000.000	330 paket	1.002.000.000	646 paket	1,654,000,000	SKPD
				Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah data/informasi/statistik daerah yang tersusun	13 dok	0	0	13 dok	157,321,000	13 dok	187.412.500	13 dok	244,947,000	13 dok	319.286.000	52 dok	908,966,500	
				Penyusunan Profil Kabupaten dan Profil Kecamatan	Jumlah buku Profil Kabupaten dan Kecamatan yang tersusun	0 dok	0	0	12 dok	87,510,500	12 dok	119.650.000	12 dok	108.355.000	12 dok	111.606.000	48 dok	427,121,500	SKPD
				Penyusunan Perkembangan Perekonomian	Jumlah dokumen data perkembangan perekonomian yang tersusun	0 dok	0	0	1 dok	69,810,500	1 dok	67.762.500	1 dok	85.127.000	1 dok	87.680.000	4 dok	310,380,000	SKPD
				Penyusunan dan pengolahan data pembangunan daerah	Jumlah buku informasi perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	0 dok	0	0	0	0	0	0	150	51.465.000	150	120.000.000	300	171,465,000	SKPD
				Program kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah Informasi Pembangunan yang Terpublikasi	0 Kali	0	0	100	1.813.950.000	100	2.612.962.000	1825	2.038.162.056	1825	3.079.800.000	3.850	9,544,874,056	

			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang terpublikasi	0 kali	0	0	364	1.813.950.000	539	2.543.276.000	0	0	0	0	903	4,357,226,000	SKPD
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media partner Pemkab. Luwu Timur	0 media	0	0	0	0	0	0	41 (9 media cetak, 15 media online, 2 majalah nasional, 2 TV, 13 TV Kabel)	1.999.162.056	42(9 media cetak, 15 media online, 2 majalah nasional, 3 TV, 13 TV Kabel)	3.019.800.000	83	5,018,962,056	SKPD
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah mass media /organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan	0 media	0	0	0	0	0	0	8	39.000.000	12	60.000.000	20	99,000,000	SKPD
			Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID)	Jumlah PPID yang terkapasitasi	0 media	0	0	0	0	50	69.686.000	0	0	0	0	50	69,686,000	SKPD
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah komunikasi, informasi dan media massa yang dikembangkan	0	0	0	85	3,749,566,047	85	3,513,776,972	9	383,300,972	9	684,611,972	9	8.331,255,963	
			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah media publikasi yang dikembangkan	0	0	0	0	251.000.000	0	251.000.000	3	0	3	221.000.000	6	723,000,000	SKPD
				Jumlah media publikasi	0	0	0	2		2		0		0		4		
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber	Jumlah peralatan pengembangan jaringan yang	0	0	0	30	1.935.927.464		57.610.000	0	0	0	0	30	1,993,537,464	SKPD

		daya komunikasi & Informasi	diadakan														
			Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina	0 kelompok	0	0	0	58,280,000	0	298.611.972	71	298.611.972	67	298.611.972	142	954,115,916	SKPD
			Jumlah Aparat Desa yang mampu mengoperasikan Internet Desa	0	0	0	150 Orang		150 Orang		0		0		300		
			Jumlah desa yang terlayani internet	0	0	0	30		30		0		0		60		
		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi	0	0	0	0	309.785.950	0	370.595.000	11	0	127	0	138	680,380,950	Kabupaten Luwu Timur
		Perencanaan & Pengembangan Kebijakan komunikasi & Informasi	Jumlah titik user internet	35 titik	0	0	35 titik	974.024.527	39 titik	1.997.775.000	0	0	0	0	74 titik	2,971,799,527	SKPD
		Pengamanan berita sandi & telekomunikasi	Jumlah berita sandi & telekomunikasi yang diamankan	1 Jenis	0	0	1 Jenis	27.075.000	1 jenis	17.615.000	0	0	0	0	2 jenis	44,690,000	Kabupaten Luwu Timur
		Pembinaan & Pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah menara yang diawasi	103 unit	0	0	103 unit	79.358.106	61 unit	64.160.000	0	0	0	0	164 unit	143,518,106	Kabupaten Luwu Timur
		Rencana Induk teknologi komunikasi & informasi	Jumlah rencana induk teknologi komunikasi & informasi yang dihasilkan	1 dok	0	0	1 dok	114.115.000	0	0	0	0	0	0	1 dok	114,115,000	Kabupaten Luwu Timur
		Pemanfaatan aplikasi sistem Administrasi Perkantoran Elektronik (E-Office)	Jumlah OPD yang menerapkan E-Office	0	0	0	0	0	20 OPD	439.340.000	0	0	0	0	20 OPD	439,340,000	Kabupaten, SKPD
	Pengelolaan Konten Website	Jumlah OPD yang dibina dalam	0	0	0	0	0	38 OPD	17,070,000	0	0	0	0	38	17,070,000	Kabupaten, SKPD	

		Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Pengelolaan Website														
		Penyelenggaraan komunikasi publik Pemerintahan Daerah	Jumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dikapasitasi	0	0	0	0	0	0	0	39	69.689.000	166	150.000.000	205	219,689,000	Kabupaten, SKPD
		Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi	Jumlah sosial media yang digunakan untuk penyebaran informasi	0	0	0	0	0	0	0	5	15.000.000	5	15.000.000	10	30,000,000	Kabupaten, SKPD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan Informatika secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2016 - 2021, maka ditampilkan tabel indikator kinerja utama (IKU) dan tabel IKK seperti yang termuat pada tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021

No.	Sasaran Indikator	IKU	Satuan	Rumusan	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir	Penanggungjawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya aksesibilitas layanan internet	Cakupan layanan internet	%	$((\text{jumlah cakupan koneksi internet pada desa/kelurahan} \times 100\%) + (\text{jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik} \times 100\%) + (\text{jumlah cakupan koneksi internet pada OPD/jumlah OPD} \times 100\%)) / 3$	0	47,92	60,81	72,44	100	100	Bidang Telematika
2.	Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah	Cakupan kinerja sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah	%	$((\text{jumlah OPD yang menerapkan E-Government/aplikasi dibagi total OPD} \times 100\%) + (\text{jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan dibagi jumlah aplikasi dan informasi} \times 100\%) + (\text{jumlah informasi yang dipublikasikan} + \text{jumlah total informasi} \times 100\%)) / 3$	0	25,64	37,99	48,34	48,34	48,34	Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang IKP

Tabel. 7.2
IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021

NO	INDIKATOR (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0 2016	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2017	2018	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	-	-	-	11.00	127.00	254.00	254.00
2	Cakupan layanan telekomunikasi	92.00	93.00	93.70	95.50	96.90	100.00	100.00
3	Presentase penduduk yang menggunakan yang menggunakan HP/Telepon	53.00	55.00	57.00	60.00	65.00	70.00	70.00
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29.20	30.00	32.50	34.85	36.95	40.53	40.53
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	15.20	15.97	16.74	17.59	18.38	19.45	19.45
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
7	Buku "Kabupaten dalam angka"	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
8	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
9	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0 2016	Tahun 1 2017	Tahun 2 2018	Tahun 3 2019	Tahun 4 2020	Tahun 5 2021	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	perangkat da							

BAB VIII

PENUTUP

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) maka dipandang perlu untuk memperbaharui/ merevisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dinas di tahun-tahun mendatang.

Perencanaan ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dinantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.



**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Luwu Timur,**

MASDIN, AP., M.Si

NIP. 19730315 199311 1 001

***L
A
M
P
I
R
A
N***

Tabel 5.3
Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif 2016 - 2021

Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
	Kinerja Program (Outcome)		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
	Kinerja kegiatan (Output)		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
Belanja																
Belanja Tidak langsung		125 Bulan	26	2,052,742,809	26	1,560,196,700	26	1,725,932,822	26	2,561,051,121	26	2,738,891,423	130	10,638,814,875	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	65 Bulan	14	1,561,409,173	14	1,009,060,700	14	1,034,351,222	14	1,888,567,071	14	2,049,095,272	70	7,542,483,438	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah bulan terbayarnya tambahan penghasilan PNS	60 Bulan	12	491,333,636	12	551,136,000	12	691,581,600	12	672,484,050	12	689,796,151	60	3,096,331,437	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Belanja Langsung				-		7,695,626,024		8,742,376,472		8,795,779,246		13,156,015,526		38,389,797,268		
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	90 %	0	-	90	880,693,000	90	912,667,000	90	933,842,850	90	1,045,522,554	90	3,772,725,404		
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai perangko dan benda pos yang tersedia (lembar)	0 Lembar	0	-	0	-	0	-	450	4,000,000	450	4,050,000	900	8,050,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air yang terbayarkan	240 Rek.	0	-	12	55,000,000	36	68,400,000	36	71,820,000	36	73,615,500	120	268,835,500	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (org)	12 orang	0	-	0	44,390,000	0	60,320,000	6	60,320,000	6	63,336,000	12	228,366,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
	Jumlah bulan terbayarkan honor pengadministrasi keuangan	57 bulan	0		12		12		0		24					
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang terbeli	80 Buah	0	-	60	18,500,000	69	26,000,000	0	38,000,000	0	39,000,000	129	121,500,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	2 orang	0		0		0		2		2		4			

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	72 Unit	0	-	41	85,000,000	41	117,250,000	45	123,112,500	45	123,112,500	172	448,475,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	0 Lembar	0	-	0	-	0	-	10,000	15,000,000	10,000	25,000,000	20,000	40,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	0 Jenis	0	-	0	-	0	-	15	30,000,000	20	30,000,000	35	60,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	0	-	0	1,000,000	0	1,000,000	30	1,500,000	30	2,000,000	60	5,500,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	0 Exemplar	0	-	60	6,180,000	60	6,240,000	60	6,552,000	60	6,552,000	240	25,524,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bakar genset dan mesin pemotong rumput yang tersedia	0 Liter	0	-	0	-	0	-	780	6,000,000	780	6,000,000	1560	12,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	342 Kali	0	-	64	369,670,000	50	276,190,000	65	303,809,000	70	334,189,900	249	1,283,858,900	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan jasa Pendukung administrasi perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi teknis yang terbayarkan	32 orang	0	-	14	148,000,000	16	204,000,000	16	198,000,000	16	204,000,000	62	754,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan penunjang operasional kesekretariatan SKPD	Presentase rata-rata capaian kegiatan operasional kesekretariatan SKPD	90 %	0	-	95	76,095,000	95	67,385,000	0	-	0	-	95	143,480,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	0 Dokumen	0	-	4	18,500,000	4	14,134,000	4	14,487,350	4	14,849,534	16	61,970,884	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	290 Kali	0	-	232	58,358,000	289	71,748,000	320	46,242,000	358	103,317,120	1199	279,665,120	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Kali	0	-	0	-	0	-	800	15,000,000	880	17,000,000	1680	32,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase rata-rata capaian kinerja sarana dan prasarana aparatur	95 %	0	-	95	985,095,977	95	1,388,308,000	95	163,000,000	95	798,000,000	95	3,334,403,977		
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	0	-	0	-	1	966,008,000	0	-	1	500,000,000	2	1,466,008,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan	0 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	2	50,000,000	2	50,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	0	-	2	581,000,000	1	5,000,000	0	-	0	-	3	586,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	114 Unit	0	-	50	369,095,977	15	178,300,000	14	120,000,000	16	190,000,000	95	857,395,977	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	2 Unit	0	-	1	20,000,000	1	216,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	6	276,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	0	-	1	15,000,000	6	23,000,000	6	23,000,000	6	23,000,000	19	84,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase aparatur yang mendapatkan pakaian	100 %	0	-	0	-	100	8,250,000	100	-	100	16,000,000	100	24,250,000		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	0 orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	0 orang	0	-	0	-	23	8,250,000	0	-	38	16,000,000	61	24,250,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase rata-rata aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	62,22 %	0	-	62,22	99,000,000	43,48	100,000,000	65,22	130,000,000	65,22	150,000,000	59,035	479,000,000		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti birntek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	37 Orang	0	-	15	99,000,000	10	100,000,000	15	130,000,000	15	150,000,000	55	479,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	6 Dokumen	0	-	0	-	6	9,000,000	6	12,000,000	6	8,000,000	18	29,000,000		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja yang tersusun	0 Dok	0	-	0	-	4	5,000,000	0	4,000,000	0	-	4	9,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	0 Dok	0	-	0	-	1	4,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	7	12,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	0 Dok	0	-	0	-	0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	2	8,000,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	0 Dok	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Diskominfo	Kantor Diskominfo

Prog. Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun tepat waktu	0 Dokumen	0	-	6	10,000,000	7	10,000,000	4	35,020,000	4	35,020,000	25	90,040,000		
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	0 Dok	0	-	6	10,000,000	7	10,000,000	8	35,020,000	4	35,020,000	25	90,040,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Jumlah data/informasi/statistik daerah yang tersusun	13 Dokumen	0	-	13	157,321,000	13	187,412,500	13	244,947,000	13	319,286,000	52	908,966,500		
Penyusunan profil kabupaten dan profil kecamatan	Jumlah buku profil kabupaten dan kecamatan yang tersusun	0 Dokumen	0	-	12	87,510,500	12	119,650,000	12	108,355,000	12	111,606,000	48	427,121,500	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyusunan perkembangan perekonomian	Jumlah dokumen data perkembangan perekonomian yang tersusun	0 Dokumen	0	-	1	69,810,500	1	67,762,500	1	85,127,000	1	87,680,000	4	310,380,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Penyusunan dan pengolahan data pembangunan daerah	Jumlah buku informasi perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	0 Buku	0	-	0	-	0	-	150	51,465,000	150	120,000,000	300	171,465,000	Diskominfo	Kantor Diskominfo
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika	Jumlah titik akses internet yang dikembangkan	0 Titik	0	-	0	-	0	-	118	2,279,460,000	67	3,720,000,000	67	5,999,460,000		
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses internet OPD yang dikembangkan	0 Titik	0	-	0	-	0	-	39	1,500,000,000	40	3,000,000,000	79	4,500,000,000	diskominfo	OPD
Pemeliharaan peralatan pengembangan jaringan	Persentase titik akses internet yang terpelihara dengan baik	0 %	0	-	0	-	0	-	100	265,000,000	100	270,000,000	100	535,000,000	Diskominfo	OPD
Pengembangan jaringan internet desa	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	0 Desa/Kelurahan	0	-	0	-	0	-	67	364,460,000	127	250,000,000	127	614,460,000	Diskominfo	Desa dan Kelurahan
Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih	0 orang	0	-	0	-	0	-	124	150,000,000	124	200,000,000	248	350,000,000	Diskominfo	OPD
Program Pengembangan Implementasi E-Government	Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi E-Government yang terintegrasi	39 OPD	0	-	0	-	0	-	10,26	882,000,000	20,51	1,761,775,000	30,77	2,643,775,000		
Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	0 Aplikasi	0	-	0	-	0	-	4	150,000,000	8	650,000,000	12	800,000,000	Diskominfo	OPD
Pengelolaan domain, portal dan website	Jumlah portal dan website yang dikelola	0 Portal/Website	0	-	0	-	0	-	39	80,000,000	39	109,775,000	39	189,775,000	Diskominfo	OPD

Pengelolaan layanan sistem LPSE	Jumlah paket yang dilelang secara elektronik dan E-Purchasing	0 Paket	0	-	0	-	0	-	316	652,000,000	330	1,002,000,000	646	1,654,000,000	Diskominfo	OPD
Program kerjasama informasi dengan Mass Media	Jumlah informasi pembangunan daerah yang terpublikasi	0 Kali	0	-	100	1,813,950,000	100	2,612,962,000	1825	2,038,162,056	1825	3,079,800,000	3850	9,544,874,056		
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang terpublikasi	0 Kali	0	-	364	1,813,950,000	539	2,543,276,000	0	-	0	-	903	4,357,226,000	Diskominfo	OPD
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media partner Pemkab. Luwu Timur	0 Mass Media	0	-	0	-	0	-	41	1,999,162,056	42	3,019,800,000	83	5,018,962,056	Diskominfo	OPD
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Mass Media/organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan	0 Lembaga/Organisasi dan Mass Media	0	-	0	-	0	-	8	39,000,000	12	60,000,000	20	99,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID)	Jumlah PPID yang terkapasitasi	0 orang	0	-	0	-	50	69,686,000	0	-	0	-	50	69,686,000	Diskominfo	OPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah komunikasi, informasi dan media massa yang dikembangkan	0 Informasi dan media massa	0	-	49	3,749,566,047	49	3,513,776,972	49	383,300,972	49	684,611,972	196	8,331,255,963		
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah media publikasi yang dikembangkan	0 Website Lutim, PPID, dan Warta Lutim	0	-	0	251,000,000	0	251,000,000	3	-	3	221,000,000	6	723,000,000	Diskominfo	Kabupaten, SKPD
	Jumlah media publikasi yang dikembangkan	0 Website Lutim dan Warta Lutim	0		2		2		0		0		4			
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah peralatan pengembangan jaringan yang diadakan	0 Unit	0	-	30	1,935,927,464	0	57,610,000	0	-	0	-	30	1,993,537,464	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Pembinaan dan pengembangan jaringan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk dan dibina	0 Kelompok	0		0	58,280,000	0	298,611,972	71		71	298,611,972	142	954,115,916	Diskominfo	OPD
	Jumlah aparat desa yang mampu mengoperasikan internet desa	0 orang	0	-	150		150		0	298,611,972	0		300			
	Jumlah desa yang terlayani internet	0 Desa	0		30		30		0		0		60			
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi	0 Kelurahan/Desa	0	-	0	309,785,950	0	370,595,000	11	-	127	-	127	680,380,950	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
	Jumlah kegiatan pengadaan dan barang dan jasa yang diadakan melalui sistem lelang elektronik	0 Paket	0	-	350	-	390	-	0	-	0	-	740		Diskominfo	
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah titik user internet	0 Titik	0	-	35	974,024,527	39	1,997,775,000	0	-	0	-	74	2,971,799,527	Diskominfo	OPD

Pengamanan berita sandi dan telekomunikasi	Jumlah berita sandi dan telekomunikasi yang diamankan	0 Jenis	0	-	1	27,075,000	1	17,615,000	0	-	0	-	2	44,690,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	0 Unit	0	-	103	79,358,106	61	64,160,000	0	-	0	-	164	143,518,106	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Rencana induk teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah rencana induk teknologi komunikasi dan informasi yang dihasilkan	0 Dokumen	0	-	1	114,115,000	0	-	0	-	0	-	1	114,115,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Pemanfaatan aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik (E-Office)	Jumlah OPD yang menerapkan E-Office	0 OPD	0	-	0	-	20	439,340,000	0	-	0	-	20	439,340,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Pengelolaan konten website pemerintah kabupaten luwu timur	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan website	0 OPD	0	-	0	-	38	17,070,000	0	-	0	-	38	17,070,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah	Jumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dikapasitasi	0 orang	0	-	0	-	0	-	39	69,689,000	166	150,000,000	205	219,689,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi	Jumlah sosial media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi	0 Sosial Media	0	-	0	-	0	-	5	15,000,000	5	15,000,000	10	30,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
Program Pengembangan Sistem Keamanan Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi	Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan	1 Aplikasi	0	-	0	-	0	-	1	1,694,046,368	2	1,538,000,000	3	3,232,046,368		
Pengembangan perangkat dan sistem data center	Jumlah perangkat sistem data center yang dikembangkan	1 Unit	0	-	0	-	0	-	1	1,694,046,368	2	1,538,000,000	3	3,232,046,368	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2021

Visi Renstra : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondial Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terwujudnya Masyarakat Informasi Luwu Timur Berbasis ITC	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jaringan dan keamanan Informasi	Persentase desa dan OPD yang terakses Internet				0%	0	-	37,42	-	37,42	-	61,29	-	0	-	0	-		
				8	Program pengembangan dan pemanfaatan telematika	Jumlah titik akses Internet yang dikembangkan	0	0	-	0	-	0	-	128	2,279,460,000	156	3,720,000,000	142	5,999,460,000		
					Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses Internet OPD yang dikembangkan (titik)	0 Titik	0	-	0	-	0	-	39	1,500,000,000	40	3,000,000,000	79	4,500,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pemeliharaan peralatan pengembangan jaringan	Persentase titik akses internet yang terpelihara dengan baik (%)	0%	0	-	0	-	0	-	100	265,000,000	100	270,000,000	200	535,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pengembangan jaringan internet desa	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet (Desa/Kelurahan)	0 Desa/Kel.	0	-	0	-	0	-	67	364,460,000	127	250,000,000	127	614,460,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih (orang)	0 Orang	0	-	0	-	0	-	124	150,000,000	124	200,000,000	248	350,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
				12	Program pengembangan sistem keamanan telekomunikasi, Informasi dan komunikasi	Jumlah aplikasi dan Informasi yang diamankan	1	0	-	0	-	0	-	1	1,694,046,368	2	1,538,000,000	1,5	3,232,046,368	Diskominfo	OPD
					Pengembangan perangkat dan sistem dan data center	Jumlah perangkat sistem data center yang dikembangkan (unit sistem data center)	0 Unit	0	-	0	-	0	-	1	1,694,046,368	2	1,538,000,000	3	3,232,046,368	Diskominfo	OPD
		Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis E-Government	Persentase OPD yang sudah menerapkan E-Government /aplikasi pemerintahan yang terintegrasi				%	0	-	0	-	30	-	60	-	100	-	100	-		
				9	Program pengembangan Implementasi E-Government	Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi E-Government yang terintegrasi	39 OPD	0	-	0	-	0	-	39	882,000,000	39	1,761,775,000	39	2,643,775,000		

					Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan (aplikasi)	0 Aplikasi	0	-	0	-	0	-	4	150,000,000	8	650,000,000	12	800,000,000	Diskominfo	OPD
					Pengelolaan domain, portal dan website	Jumlah portal dan website yang dikelola (portal/website OPD)	0 Portal	0	-	0	-	0	-	39	80,000,000	39	109,775,000	39	189,775,000	Diskominfo	OPD
					Pengelolaan layanan sistem LPSE	Jumlah paket yang dilelang secara elektronik dan E-Purchasing (paket)	0 Paket	0	-	0	-	0	-	316	652,000,000	330	1,002,000,000	646	1,654,000,000	Diskominfo	OPD
		Meningkatnya pelayanan Informasi dan komunikasi publik	Persentase Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi				0%	0	-	13,07	-	13,72	-	27,53	-	45,68	-	45,68	-		
				10	Program kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah Informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpublikasi	0 Kali	0	-	100	1,813,950,000	100	2,612,962,000	1825	2,038,162,056	1825	3,079,800,000	3850	9,544,874,056		
					Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah informasi pembangunan daerah yang terpublikasi (kali)	0 Kali	0	-	364	1,813,950,000	539	2,543,276,000	0	-	0	-	903	4,357,226,000	Diskominfo	SKPD
					Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah media partner Pemkab. Luwu Timur (mass media)	0 Mass Media	0	-	0	-	0	-	41	1,999,162,056	42	3,019,800,000	83	5,018,962,056	Diskominfo	SKPD
					Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah mass media / organisasi yang terlibat dalam penyebarluasan informasi bersifat penyuluhan (lembaga)	0 Lembaga	0	-	0	-	0	-	8	39,000,000	12	60,000,000	20	99,000,000	Diskominfo	SKPD
					Penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi daerah (PPID)	Jumlah PPID yang terkapasitas (orang)	0 Orang	0	-	0	-	50	69,686,000	0	-	0	-	50	69,686,000	Diskominfo	SKPD
				7	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah data/informasi/statistik daerah yang tersusun	13 Dokumen	0	-	13	157,321,000	13	187,412,500	13	244,947,000	13	319,286,000	0	908,966,500		
					Penyusunan profil kabupaten dan profil kecamatan	Jumlah buku profil kabupaten dan kecamatan yang tersusun (dokumen)	0 Dokumen	0	-	12	87,510,500	12	119,650,000	12	108,355,000	12	111,606,000	48	427,121,500	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Penyusunan perkembangan perekonomian	Jumlah dokumen data perkembangan perekonomian yang tersusun (dokumen)	0 Dokumen	0	-	1	69,810,500	1	67,762,500	1	85,127,000	1	87,680,000	4	310,380,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur

					Penyusunan dan pengolahan data pembangunan daerah	Jumlah buku informasi perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan (buku)	0 Buku	0		0		0		150	51,465,000	150	120,000,000	300	171,465,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
			11		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah komunikasi, informasi dan media massa yang dikembangkan	0 Informasi dan media massa	0		85	3,749,566,047	85	3,513,776,972	9	383,300,972	9	684,611,972	0	8,331,255,963		
					Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah media publikasi yang dikembangkan	0	0		0	251,000,000	3	251,000,000	3		3	221,000,000	9	723,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
						Jumlah media publikasi	0	0		2		0		0		0		0			
					Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah peralatan pengembangan jaringan yang diadakan	Unit	0		30	1,935,927,464	0	57,610,000	0		0			1,993,537,464	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina	Kelompok	0		0		0		71		67		138		Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
						Jumlah aparat desa yang mampu mengoperasikan internet desa	Desa	0		0	58,280,000	0	298,611,972	150	298,611,972	150	298,611,972	300	954,115,916	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
						Jumlah desa yang terlayani internet	Desa	0		0		0		150		150		300		Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	0		0	309,785,950	0	370,595,000	11		127		138	680,380,950	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
						Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diadakan melalui sistem lelang elektronik	Paket	0		350		390		0		0		740		Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah titik user internet	Titik	0		35	974,024,527	39	1,997,775,000	0		0		74	2,971,799,527	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pengamanan berita sandi dan telekomunikasi	Jumlah berita sandi dan telekomunikasi yang diamankan	Jenis	0		1	27,075,000	1	17,615,000	0		0		2	44,690,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pembinaan dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	Unit	0		103	79,358,106	61	64,160,000	0		0		164	143,518,106	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Rencana induk teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah rencana induk teknologi komunikasi dan informasi yang dihasilkan	Dokumen	0		1	114,115,000	0		0		0		1	114,115,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pemanfaatan aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik (E-Office)	Jumlah OPD yang menerapkan E-Office	OPD	0		0		20	439,340,000	0		0		20	439,340,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur

					Pengelolaan konten website pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan website	OPD	0	-	0	-	38	17,070,000	0	-	0	-	38	17,070,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Penyelenggaraan komunikasi publik Pemerintahan Daerah	Jumlah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dikapasitasi	Orang	0	-	0	-	0	-	39	69,689,000	166	150,000,000	205	219,689,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
					Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi	Jumlah sosial media yang digunakan untuk penyebaran informasi	Sosmed	0	-	0	-	0	-	5	15,000,000	5	15,000,000	10	30,000,000	Diskominfo	Kabupaten Luwu Timur
2	Mewujudkan kinerja pelayanan perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Prestasi nilai AKIP				0 Nilai	0	-	55	-	60	-	65	-	70	-	70	-		
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	90%	0	-	90	880,693,000	90	912,667,000	90	933,842,850	90	1,045,522,554	90	3,772,725,404		
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi perangkat dan benda pos yang tersedia	Lembar	0	-	0	-	0	-	450	4,000,000	450	4,000,000	900	8,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan (Rekening)	Rekening	0	-	0	55,000,000	0	68,400,000	36	71,820,000	36	73,615,500	72	268,835,500	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)	Orang	0	-	0	44,390,000	0	60,320,000	6	60,320,000	6	63,336,000	12	228,366,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)	Orang	0	-	0	18,500,000	0	26,000,000	2	38,000,000	2	39,000,000	4	121,500,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	Unit	0	-	41	85,000,000	41	117,250,000	45	123,112,500	45	123,112,500	172	448,475,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (sebab)	Lembar	0	-	0	-	0	-	10000	15,000,000	10000	25,000,000	20000	40,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Jenis	0	-	0	-	0	-	15	1,500,000	20	1,500,000	35	3,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (unit)	Unit	0	-	0	1,000,000	0	1,000,000	30	1,500,000	30	1,500,000	60	5,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika

					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan (eksemplar)	Eksemplar	0	-	60	6,180,000	60	6,240,000	60	6,552,000	60	6,552,000	240	25,524,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan bakar genset dan mesin pemotong rumput yang tersedia (liter)	Liter	0	-	0	-	0	-	780	6,000,000	780	6,000,000	1560	12,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	0	-	64	369,670,000	50	276,190,000	65	303,809,000	70	334,189,900	249	1,283,858,900	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	Orang	0	-	14	148,000,000	16	204,000,000	16	198,000,000	16	204,000,000	62	754,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)	%	0	-	95	76,095,000	95	67,385,000	0	-	0	-	190	143,480,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	-	4	18,500,000	4	14,134,000	4	14,487,350	4	14,849,534	16	61,970,884	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (Kali)	Kali	0	-	232	58,358,000	289	71,748,000	320	46,242,000	358	103,317,120	1199	279,665,120	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan makan dan minum	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kotak	0	-	0	-	0	-	800	15,000,000	880	17,000,000	1680	32,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
				2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja sarana dan prasarana aparatur	95%	0	-	95	985,095,977	95	1,388,308,000	95	163,000,000	95	798,000,000	380	3,334,403,977		
					Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun (Unit)	Unit	0	-	0	-	1	966,008,000	0	-	1	500,000,000	2	1,466,008,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	Unit	0	-	0	-	0	-	1	-	2	50,000,000	3	50,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	Unit	0	-	2	581,000,000	1	5,000,000	0	-	0	-	3	586,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	Unit	0	-	50	369,095,977	15	178,300,000	14	120,000,000	16	190,000,000	95	857,395,977	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Unit	0	-	1	20,000,000	1	216,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	6	276,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika

					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	Unit	0	-	1	15,000,000	6	23,000,000	6	23,000,000	7	38,000,000	20	99,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
			3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan disiplin aparaturnya	100%	0	-	0	-	100	8,250,000	100	-	100	16,000,000	300	24,250,000		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas (Orang)	Orang	0	-	0	-	0	-	38	-	0	-	0	-	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (Orang)	Orang	0	-	0	-	23	8,250,000	0	-	38	16,000,000	61	24,250,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
			4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	62,22%	0	-	62,22	99,000,000	43,48	100,000,000	65,22	130,000,000	65,22	150,000,000	59,035	479,000,000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)	Orang	0	-	15	99,000,000	10	100,000,000	15	130,000,000	15	150,000,000	55	479,000,000	Diskominfo	Dalam dan Luar Daerah
			5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	6 Dok.	0	-	0	-	6	9,000,000	6	12,000,000	6	8,000,000	18	29,000,000		
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen ikhtisar perencanaan yang tersusun	Dokumen	0	-	0	-	4	5,000,000	0	4,000,000	0	-	4	9,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	Dokumen	0	-	0	-	1	4,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	7	12,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	4,000,000	1	4,000,000	2	8,000,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
					Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
			6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	0 Dok.	0	-	6	10,000,000	7	10,000,000	4	35,020,000	4	35,020,000	25	90,040,000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	-	6	10,000,000	7	10,000,000	8	35,020,000	8	35,020,000	29	90,040,000	Diskominfo	Kantor Komunikasi dan Informatika
TOTAL									0		7,695,626,024		8,742,376,472		8,795,779,246		13,156,015,526		38,389,797,268		

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	IKU	FORMULASI HITUNG INDIKATOR	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan kualitas layanan komunikasi dan informatika	1 Meningkatnya akseibilitas layanan internet	- Cakupan layanan internet	√	$\frac{((\text{Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan} / \text{Jumlah Desa/Kelurahan} \times 100\%) + (\text{Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik} / \text{Jumlah ruang publik} \times 100\%) + (\text{Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD} / \text{Jumlah OPD}))}{3}}$	Jumlah desa/kelurahan, ruang publik dan OPD yang telah terakses internet t	Eselon II dari Bidang Telematika
		2 Meningkatnya sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah	- Cakupan kinerja sistem keamanan dan layanan informasi manajemen pemerintah daerah	√	$\frac{((\text{Jumlah OPD yang menerapkan E-Government} / \text{Aplikasi dibagi total OPD} \times 100\% + \text{Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan dibagi Jumlah aplikasi dan informasi} \times 100\% + \text{Jumlah informasi yang dipublikasikan} + \text{Jumlah total informasi} \times 100\%))}{3}}$	Data jumlah aplikasi yang digunakan pada persandian	Eselon II dari Bidang Aplikasi Informatika Dan Bidang Informasi Komunikasi Publik
		3 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	- Nilai SAKIP		Nilai LAKIP	Hasil evaluasi LAKIP	Eselon II dari Sekertariat